

ANALISIS TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Author:

**R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung¹, Anindita Primastuti²,
Riswati³**

Affiliation:

**Pemerintah Kota Bandung
Jl. Wastukencana No. 2 Bandung-Jawa Barat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Soekarno Km. 20 Jatinangor Sumedang-Jawa Barat**

Email:

rouffieputra@gmail.com¹; anindita@ipdn.ac.id²; riswati@ipdn.ac.id³

Abstract

The government runs a government system in order to ensure that the functions of a country can be carried out optimally. Financial affairs are one of the most important things in a complex government system. The implementation of finance in a Government in the annual financial report as a form of accountability for the implementation of the government. The regional financial reports can be analyzed to find out how regional finances are implemented, whether they are optimal or not. Especially if there are conditions such as the Covid-19 pandemic that has occurred since 2019 which of course has no effect on how the government is managed. This study aims to find out how the ratio of regional financial independence and regional financial growth in the city of Bandung during the 2016 to 2021 fiscal year, especially how the financial implementation was before and before the Covid-19 pandemic. The research method used in this study uses a qualitative research model with a descriptive approach. The data collection method uses secondary data in the form of financial reports which are explored through literacy/document studies. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or results from research. The results of this study show that the ratio of financial independence in the city of Bandung in the period 2016 to 2021 is an average of 74.17% and the independence ratio is consistently above 60% every year, although in 2020 it is consistent with the Covid-19 pandemic. As for regional financial growth in Bandung City, it shows that from 2017 to 2021, the Bandung City Government only experienced negative financial growth twice, namely in 2017 and in 2020 which was discovered by the Covid-19 Pandemic.

Keywords: *Public Regional Finance, Financial Independence Ratio, Financial Growth*

Abstrak

Pemerintah berfungsi menjalankan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan bahwa fungsi dari suatu negara dapat terselenggara dengan optimal. Urusan keuangan menjadi salah satu unsur penting diantara banyaknya urusan dalam suatu sistem pemerintahan yang kompleks. Pelaksanaan keuangan di suatu Pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan daerah tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana keuangan daerah dilaksanakan, apakah sudah optimal atau belum. Terlebih apabila ada kondisi seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 yang tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2021, terlebih pada bagaimana pelaksanaan keuangan tersebut

pada saat sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didalami melalui studi literasi/dokumen. Teknik analisa data terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya, sekalipun pada 2020 terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Keuangan.

PENDAHULUAN

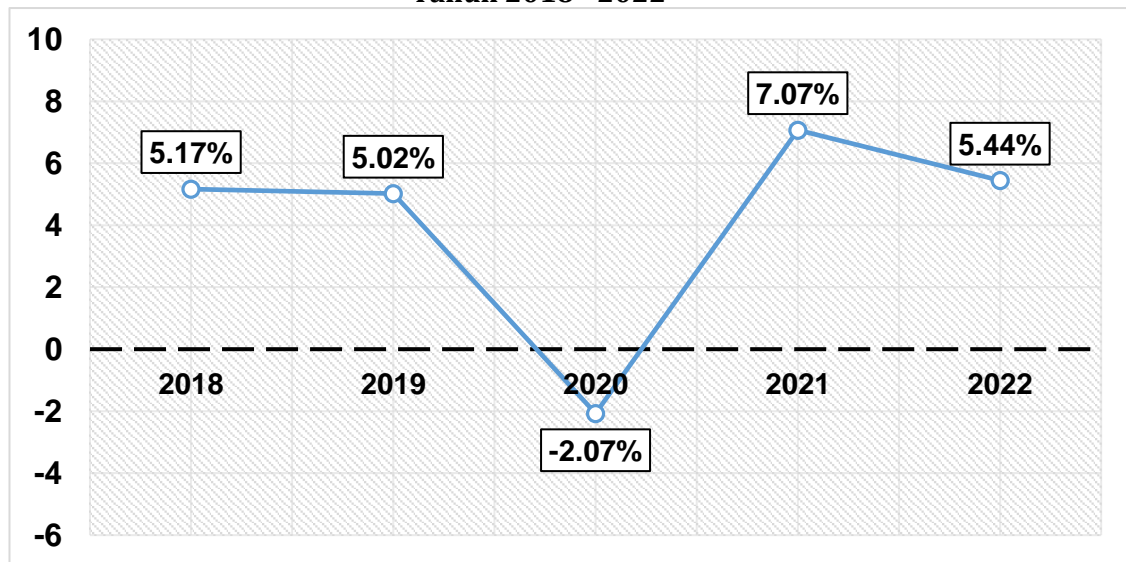
Dalam menjalankan fungsi negara yang diatur dan dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan yang kompleks tentunya terdiri atas berbagai urusan dalam beragam bidang. Dari sekian banyaknya bidang dan urusan dalam pelaksanaan siste Pemerintahan, bidang keuangan menjadi salah satu bidang yang fundamental apabila berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan fungsi dari suatu negara. Keuangan Pemerintah menjadi aspek yang sangat penting karena seluruh penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan pendanaan yang diatur dalam urusan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan keuangan, Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat dan dijadikan patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terlebih dahulu disetujui oleh DPRD. APBD tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan daerah tentang APBD yang berlaku dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari hingga tanggal 31 Desember pada tahun yang sama. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana APBD tersebut dilaksanakan maka akan dituangkan dalam laporan keuangan yang terdiri dalam beberapa format yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari berbagai format dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut

dapat diketahui apakah pelaksanaan keuangan sudah dilaksanakan dengan optimal atau belum.

Terlebih sejak akhir tahun 2019 Indonesia masih mengalami Pandemi Covid-19 yang belum dinyatakan berakhir hingga memasuki tahun 2022. Pandemi Covid-19 tersebut berdampak sangat merugikan pada berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sehari – hari, termasuk didalamnya pada aspek perekonomian makro maupun mikro. Untuk aspek ekonomi makro, Pandemi Covid-19 tersebut telah berdampak pada angka pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berikut adalah rinciannya:

Grafik
Angka Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
Tahun 2018 - 2022



Sumber: kemenkeu.go.id, diolah Penulis

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia berada pada angka 5% per tahun anggaran. Namun pada 2020 yang terdampak Covid-19, pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan hingga menyebabkan resesi yang berarti angka pertumbuhan perekonomian berada di bawah 0% dengan angka mencapai -2,07% pada 2020. Namun setelah itu, pada tahun anggaran 2021 angka pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami peningkatan selaras dengan pemulihan dan penerapan kebiasaan baru di masyarakat. Tercatat angka pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada 2021 sebesar 7,07%. Hal tersebut berarti baik ditambah pada 2022 angka pertumbuhan perekonomian Indonesia kembali pada kisaran 5% per tahun anggaran.

Naik atau turunnya angka pertumbuhan perekonomian tentu berdampak pada bagaimana pemerintahan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun hingga pada tingkat daerah seperti Kabupaten/Kota. Maka akan menarik untuk mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahan yang ditinjau dari aspek keuangan daerah melalui laporan keuangan yang dibuat. Terdapat banyak metode untuk menganalisis laporan keuangan daerah dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keuangan di Pemerintah Daerah tersebut. Metode analisis keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Halim, 2007).

Tujuan dari penulisan jurnal dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan bagaimana arah dari pertumbuhan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. Terlebih pada 2020 dan 2021 yang masih terdampak oleh Pandemi Covid-19 sehingga penelitian ini dapat menjawab bagaimana keuangan daerah di Kota Bandung selama masa – masa sulit tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah sesuai dengan yang tertuang dalam PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak beserta kewajiban daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dinilai dengan uang serta berbagai bentuk kekayaan lainnya yang dapat dijadikan milik daerah yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari Pemerintah Daerah tersebut. Dalam pelaksanaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dipegang oleh Kepala Daerah selaku perwakilan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Daerah.

Penyelenggaraan dan kekuasaan yang dilimpahkan pada tiap – tiap Pemerintah pada tingkat Daerah membuat Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap – tiap daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik dan pengelolaan keuangan di tiap daerah maka akan menghasilkan kondisi keuangan daerah yang berbeda pula di masing – masing daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Terdapat model penelitian yang dilakukan dengan analisis deskriptif dengan metode indeks komposit kondisi keuangan dan klusterisasi Pemerintah Daerah Kota Magelang oleh (Maizunati, 2017). Selain itu, ada juga penelitian tentang pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang yang dilakukan oleh (Trianto, 2017). Kemudian ada model analisis atas kondisi keuangan dengan menggunakan metode Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) yang dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Kota Magelang yang dilakukan oleh (Priyono et al., 2020). Sedangkan untuk model analisis kondisi keuangan yang akan digunakan dalam jurnal ini serupa dengan penelitian atas kondisi keuangan di Kota Tarakan yang dilakukan oleh (Fathah, 2017) yang menggunakan rasio kemandirian keuangan serta mengukur tingkat pertumbuhan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

Sesuai dengan judul dari artikel ini, maka model dalam mengukur kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam artikel ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan tingkat pertumbuhan keuangan pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang menunjukkan sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui dengan cara berikut ini:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2007)

Besaran dalam tingkat/rasio kemandirian dalam keuangan di suatu Pemerintahan Daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Berikut adalah tabel tentang rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan Pemerintah:

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25%	Instruktif
Rendah	> 25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber : (Halim, 2007)

Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan maupun belanja secara positif maupun negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

- r = Rasio Pertumbuhan
- P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n
- P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas fenomena atau objek penelitian yang sedang diteliti (Simangunsong, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dengan dan rasio pertumbuhan keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Halim, 2007) sesuai yang dilampirkan dalam kajian pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literasi dan studi dokumen yang sepenuhnya berpatokan pada laporan keuangan dari Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengetahui bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan bagaimana pertumbuhan keuangannya (Sugiyono, 2017). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini berupa rasio kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung yang dimulai pada tahun anggaran 2016 hingga 2021. Data yang digunakan merupakan data yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2016 hingga 2021. Untuk lebih jelas maka berikut adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah didapatkan dari pembagian antara PAD yang dibagi dengan total pendapatan transfer yang diterima daerah dalam kurun waktu

satu tahun anggaran. Hasil pembagian tersebut selanjutnya disajikan dalam besaran persentase. Berikut rincian pendapatan transfer, pendapatan asli daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung pada tahun anggaran 2016 hingga tahun 2021:

Tabel 1
Rincian Pendapatan Transfer, PAD, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Bandung pada 2016 - 2021

Keterangan	Pendapatan Transfer	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2016	Rp.3.262.837.853.733	Rp.2.152.755.704.962	66%
2017	Rp.3.135.976.228.203	Rp.2.578.457.420.885	82%
2018	Rp.3.368.410.000.000	Rp.3.397.309.517.811	101%
2019	Rp.3.626.141.954.361	Rp.2.548.258.990.275	70%
2020	Rp.3.352.264.380.653	Rp.2.063.783.773.735	62%
2021	Rp.3.417.764.482.463	Rp.2.195.971.884.100	64%
	Rata - rata		74,16%

Sumber: ppid.bandungkota.go.id

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung sesuai dengan data yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan konsistensi dengan selalu berada diatas 60% dalam rentang tahun anggaran 2016 hingga 2021. Hal tersebut berbanding jauh dengan tingkat kemandirian keuangan dari Pemerintah Kota Malang pada tahun 2007 – 2011 yang hanya berada pada kisaran 14 hingga 28% (Albasiah, 2013). Selain tingkat rasio kemandirian keuangan di Pemerintah Kota Malang, tingkat rasio kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih rendah apabila dibandingkan dengan Kota Bandung dengan rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah yang hanya sebesar 8,08% saja dalam kurun waktu 2008 hingga 2018 (Oki et al., 2020). Rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah juga tercatat pada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2013 – 2017 dengan rata – rata sebesar 11,72% (Fitriyani et al., 2019).

Dari hasil dan temuan pada penelitian tentang rasio kemandirian keuangan daerah dari Pemerintah Kota Bandung pada rentang 2016 hingga 2021 adalah sebesar 74,16%. Angka rasio kemandirian keuangan daerah yang tinggi di Kota Bandung tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan antara pola hubungan

keuangan Pemerintah Pusat dengan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah rincian pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan angka rasio kemandirian keuangan daerah:

Tabel 2
Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung
Pada Tahun Anggaran 2016 - 2021

Tahun	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	66%	Partisipatif
2017	82%	Delegatif
2018	101%	Delegatif
2019	70%	Partisipatif
2020	62%	Partisipatif
2021	64%	Partisipatif

Sumber: (Halim, 2007), diolah Penulis

Tingginya rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung menjadikan pola hubungna keuangan yang diterapkan antara Pemerintah Pusat dengan Kota Bandung adalah Partisipatif dan Delegatif, sesuai dengan kriteria yang dikemukakan (Halim, 2007). Pola hubungan keuangan Partisipatif terjadi pada 2016, 2019, 2020, dan 2021 dengan rasio antara 62 – 70%. Hal tersebut menandakan bahwa meskipun pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan pemerintahan, termasuk perekonomian terganggu tetapi rasio kemandirian berada pada angka yang baik. Sedangkan pada 2017 dan 2018 pola hubungan yang dilakukan adalah Delegatif dengan rasio kemandirian keuangan pada 2017 sebesar 82% bahkan mencapai 101% pada 2018 yang berarti PAD di Kota Bandung lebih banyak dibandingkan dengan total pendapatan transfer yang diterima. Disisi lain, pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota lainnya seperti Kota Malang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumbawa yang berada dibawah 25% yang berarti menerapkan pola hubungan keuangan Instruktif.

b. Pertumbuhan Keuangan Derah

Rasio pertumbuhan keuangan daerah terdiri atas 4 indikator, yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja operasi. Untuk rincian besaram dari keempat indikator rasio pertumbuhan keuangan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Rincian Pendapatan Daerah, PAD, Belanja Modal, dan Belanja Operasi
di Kota Bandung pada 2016 hingga 2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Belanja Operasi
2016	Rp.5.685.213.859.929	Rp.2.152.755.704.962	Rp.1.254.021.785.263	Rp.4.575.469.446.261
2017	Rp.5.735.006.649.088	Rp.2.578.457.420.885	Rp.918.875.016.069	Rp.4.621.596.474.148
2018	Rp.6.672.618.474.393	Rp.3.397.309.517.811	Rp.1.049.700.000.000	Rp.5.061.560.000.000
2019	Rp.6.381.818.944.636	Rp.2.548.258.990.275	Rp.1.179.429.469.424	Rp.5.131.020.269.061
2020	Rp.5.643.962.288.458	Rp.2.063.783.773.735	Rp.558.480.367.618	Rp.4.650.334.229.661
2021	Rp.5.838.244.931.395	Rp.2.195.971.884.100	Rp.721.566.424.793	Rp.4.841.595.685.018

Sumber: ppid.bandungkota.go.id

Data pada rincian diatas didapatkan dari laporan realisasi anggaran Kota Bandung pada 2016 hingga 2021. Pendapatan Daerah di Kota Bandung berada kisaran 5,6 hingga 6,6 Triliun Rupiah per tahun anggaran. Total PAD di Kota Bandung berada pada kisaran 2 hingga 3,3 Triliun Rupiah. Sedangkan untuk Belanja Modal berada pada rentang 500 Juta hingga 1,2 Triliun Rupiah dan Belanja Operasi Kota Bandung pada 2016 hingga 2021 berada pada rentang 4,5 hingga 5,1 Triliun Rupiah. Data tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus untuk mengukur rasio pertumbuhan keuangan daerah sesuai dengan model (Halim, 2007). Berikut adalah rincian dan hasil dari rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Bandung pada 2016 hingga 2021:

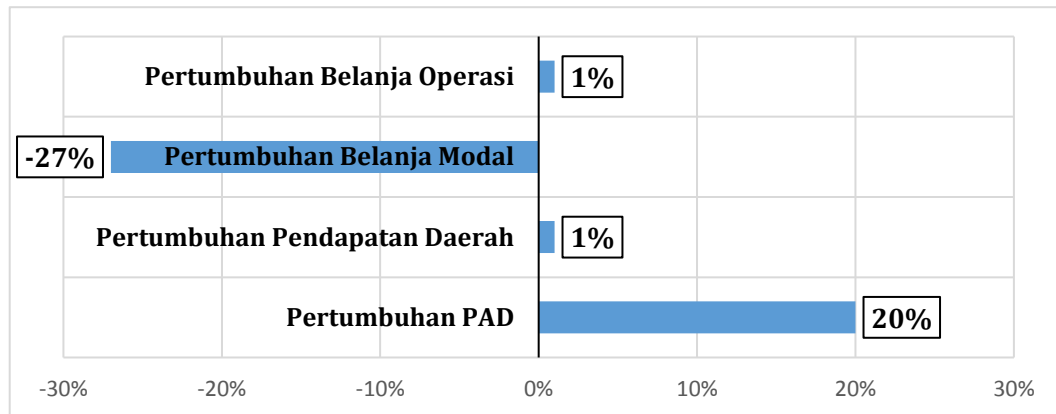
Tabel 4
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah di Kota Bandung pada 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Pertumbuhan PAD	20%	32%	-25%	-19%	6%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	1%	16%	-4%	-12%	3%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	-27%	14%	12%	-53%	29%
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	1%	10%	1%	-9%	4%

Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Dari rasio pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada 2017 hingga 2021 diatas menunjukkan bahwa besaran dari 4 indikator yang menjadi bagian dari rasio pertumbuhan keuangan daerah dinamis dan sangat fluktuatif di setiap tahun anggaran. Berikut ini pembahasannya per tahun anggaran:

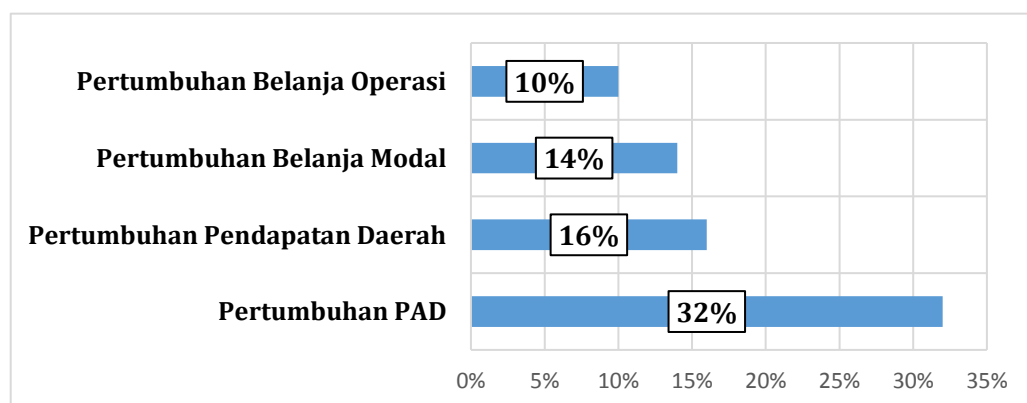
Grafik 1
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2017



Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Pada tahun 2017, Rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun sebelumnya yang disertai dengan peningkatan total pendapatan daerah sebesar 1% dari tahun anggaran 2016. Sesuai dengan kriteria dalam pengelompokan pertumbuhan keuangan menurut (Halim, 2007) maka pada tahun 2017 dikatakan mengalami pertumbuhan perekonomian yang negatif karena rasio pertumbuhan PAD, total pendapatan daerah, dan total belanja operasi mengalami peningkatan sedangkan total belanja modal mengalami penurunan sebesar 27% dari tahun anggaran 2016.

Grafik 2
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2018

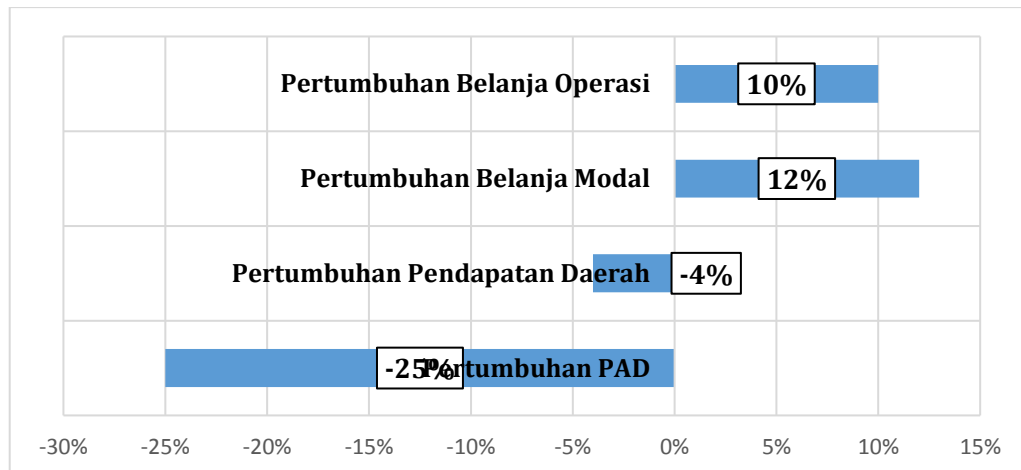


Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Pada tahun anggaran 2018, tingkat pertumbuhan PAD meningkat 32% dari total PAD tahun anggaran 2017 serta total pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 16% apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan

untuk Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 14% yang lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada total belanja operasi sehingga pertumbuhan keuangan pada 2018 dikategorikan positif.

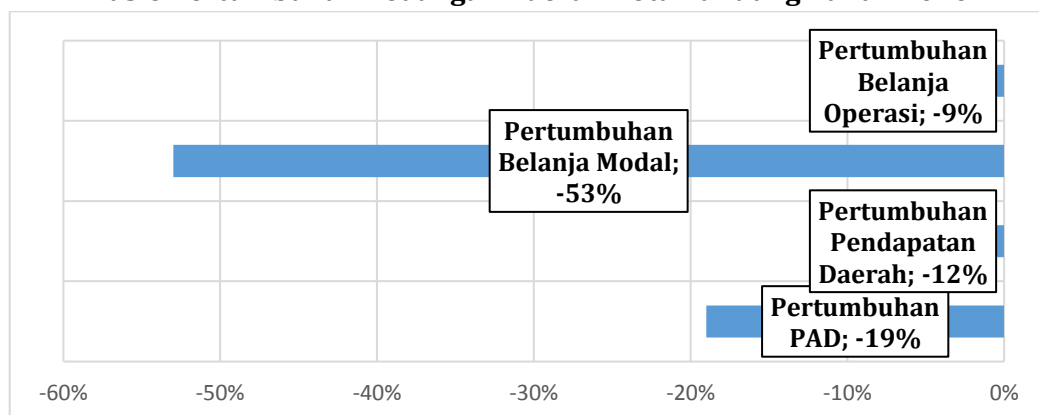
Grafik 3
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2019



Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Terjadi penurunan pada total PAD dan Pendapatan Daerah pada 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan besaran penurunan sebesar 25% dan 4%. Namun penurunan pada 2019 tersebut justru berbanding terbalik dengan peningkatan yang terjadi pada total belanja modal dan belanja operasi yang meningkat sebesar 12% dan 1% dari total belanja modal dan operasi yang direalisasikan pada tahun anggaran 2018. Berpatokan pada hal tersebut maka pertumbuhan keuangan di tahun anggaran 2019 dikategorikan sebagai positif.

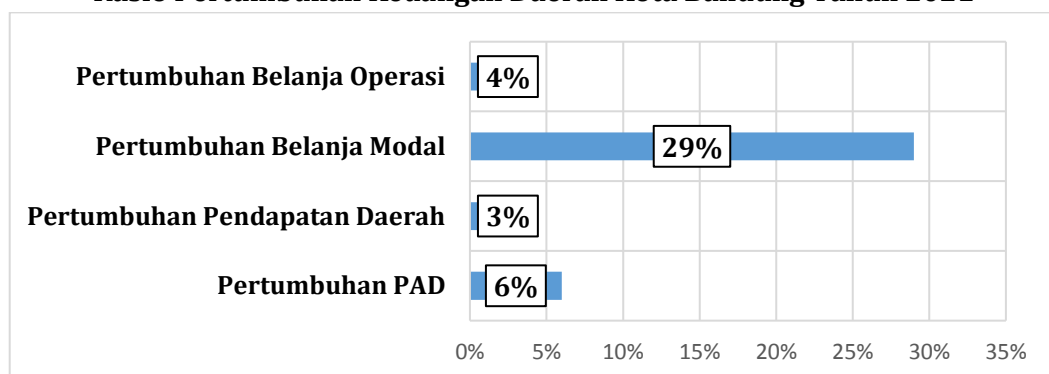
Grafik 4
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2020



Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Terkhusus pada 2020, seluruh indikator dalam pertumbuhan keuangan daerah mengalami penurunan yang faktor penyebab dominannya adalah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak sekali aspek dalam pelaksanaan kehidupan sehari – hari. Pertumbuhan PAD di Kota Bandung menurun sebesar 19% pada 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tidak terdampak Covid-19. Penurunan serupa juga terjadi pada total pendapatan daerah Kota Bandung pada 2020 yang menurun sebesar 12% secara total apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah pada 2019. Sedangkan untuk belanja, belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan angka penurunan yang mencapai 53% apabila dibandingkan tahun 2019 dan belanja operasi menurun sebesar 9% dari tahun anggaran 2019. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada 2020 dikatakan negatif karena Belanja modal memiliki tingkat penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan belanja operasi.

Grafik 5
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2021



Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah Penulis

Setahun berselang dari Pandemi yang mencapai puncaknya pada tahun anggaran 2020, perekonomian berangsur kembali pulih dan bangkit pada tahun anggaran 2021. Hal tersebut terlihat dari peningkatan yang terjadi pada 4 indikator yang berpengaruh pada pertumbuhan keuangan daerah. Total PAD pada 2021 meningkat sebanyak 6% dari tahun 2020 yang terdampak Covid-19 dan secara keseluruhan, total pendapatan daerah meningkat sebesar 3% pada 2021 dibandingkan 2020 yang terdampak Pandemi. Sedangkan untuk belanja, belanja modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan mencapai 29% yang juga diikuti peningkatan pada total belanja operasi sebesar 4% dari total belanja operasi pada tahun anggaran 2021. Maka pada tahun anggaran 2021 pertumbuhan

keuangan di Kota Bandung dikategorikan positif karena pertumbuhan belanja modal lebih besar dibanding dengan belanja operasi.

Dari hasil analisis atas pertumbuhan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2017 hingga 2021 maka didapatkan hasil dari penelitian

Tabel 5
Arah Pertumbuhan Keuangan

Tahun	Arah Pertumbuhan Keuangan
2017	Negatif
2018	Positif
2019	Positif
2020	Negatif
2021	Positif

Sumber: (Halim, 2007), diolah Penulis

Hasil akhir dari rasio pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukkan arah pertumbuhan negatif pada 2017 dan 2020. Sedangkan pada 2018, 2019, dan 2021 menunjukkan arah pertumbuhan keuangan yang positif.

Secara umum, keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung selalu memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang sangat tinggi sekalipun pada 2020 dan 2021 pelaksanaan pemerintahan terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk analisis pada pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung tercatat mengalami arah pertumbuhan yang negatif pada 2020 karena terdampak oleh Pandemi Covid-19. Namun pada tahun anggaran 2021, pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung sudah mengarah kembali pada angka positif meskipun angka pertumbuhan keuangan daerah yang ditorehkan masih relatif kecil dan belum mencapai angka yang ada pada tahun anggaran 2019 yang belum terdampak oleh Pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini secara ringkas terbagi kedalam dua pokok bahasan, yaitu mengenai rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung memiliki angka yang sangat tinggi dengan rata – rata rasio kemandirian keuangan sebesar 74,16% pada tahun anggaran

2016 hingga 2021. Tingginya rasio kemandirian keuangan tersebut berpengaruh pada pola hubungan keuangan yang diterapkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung. Setidaknya Pemerintah Kota Bandung menerapkan pola hubungan keuangan partisipatif pada tahun anggaran 2016, 2019, 2020, dan 2021 karena memiliki rasio kemandirian keuangan pada kisaran >50 – 75%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 dan 2018, pola hubungan keuangan yang diterapkan adalah delegatif karena rasio kemandirian keuangan diatas 75%. Bahkan pada tahun 2018, angka rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung mencapai 101% yang berarti total PAD di Kota Bandung lebih besar dibandingkan total pendapatan transfer yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Temuan kedua yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pertumbuhan keuangan daerah. Hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besaran dari pendapatan daerah, PAD, belanja modal, dan belanja operasi di Kota Bandung sangat dinamis dan fluktuatif disetiap tahun anggaran yang berbeda. Namun secara ringkas dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis atas pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung tiga kali mengalami arah pertumbuhan keuangan daerah yang positif yaitu pada tahun anggaran 2018, 2019, dan 2021. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mengalami dua kali arah pertumbuhan keuangan daerah yang cenderung pada arah negatif, yaitu pada tahun anggaran 2017 dan 2020.

Secara umum, rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung konsisten berada pada angka yang tinggi dengan selalu diatas 60% sekalipun pada 2020 dan 2021 terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk arah pertumbuhan keuangan daerah, pada rentang 2016 hingga 2021 Pemerintah Kota Bandung tercatat mengalami dua kali arah pertumbuhan keuangan daerah negatif yaitu pada tahun anggaran 2017 dan 2020. Terkhusus pada tahun anggaran 2020, faktor dominannya adalah Pandemi Covid-19, namun pada 2021 pertumbuhan keuangan daerah sudah kembali mengarah pada arah positif meskipun Pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang baik yang berkaitan dengan bagaimana keuangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Albasiah, O. A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun

- Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1-10.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33-48.
- Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Puspita, B. (2019). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 - 2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(1), 26-36.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN.
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa - Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 140-162.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1-6.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., Bharata, R. W., & Arifah, S. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) di Kota Magelang. *Journal of Public and Business Accounting*, 2, 1(2), 1-11.
- Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Literatur IPDN.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk. Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(03), 1-10.